

**MENINJAU ULANG KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
(Studi Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa
Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang)**

Putri Aril Lasari¹, Khoiron², Taufiq Rahman Ilyas³

*Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: putriarillasari@gmail.com*

ABSTRAK

BPD ialah lembaga yang perwakilan masyarakat dan berhak mengatur dan mengurus keperluan masyarakat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. BPD berperan sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu memberikan jawaban terkait kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun masih sering dijumpai bahwa BPD masih belum melaksanakan peran dan fungsinya dengan optimal. Terbukti dengan banyaknya permasalahan terkait aspirasi masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang belum terealisasi. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui (1) Kinerja BPD dalam fungsi menampung dan menyalurkan keinginan penduduk di Desa Tamankuncaran. Metode penelitian ini yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memilih metode kualitatif ini dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam secara detail dan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian menggambarkan secara deskriptif tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini antara lain : pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan penelitian menggunakan teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Bastian (2006 : 267). Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kinerja BPD dalam fungsi menampung dan menyalurkan keinginan penduduk telah terlaksana dengan optimal yakni masukan, proses, keluaran, hasil dan manfaat. Akan tetapi masih ada beberapa indikator yang pelaksanaannya belum optimal seperti indikator proses terkait dengan sarana prasarana yang belum memadai serta SDM yang kurang maksimal, dan indikator keluaran yakni masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan dan terlaksanakan.

Kata Kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aspirasi

Pendahuluan

Desa yaitu wilayah yang berada pada lapisan terbawah namun dalam penyelenggaraan pemerintahannya desa juga mempunyai hak untuk dapat mengurus wilayahnya sendiri. Sehingga dengan demikian bahwa desa mempunyai hak otonomi desa yang mana dikemukakan oleh Widjaja (2003) dalam bukunya menyatakan bahwa otonomi desa ialah otonomi asli dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Begitu juga pemerintahan mempunyai kewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja, 2003 : 165). Dengan adanya otonomi desa diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, kemandirian desa, kemajuan desa, pembangunan desa sekaligus dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam beraspirasi.

Pemerintahan desa yaitu suatu kegiatan pelaksanaan pemerintahan yang didalamnya terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pada pelaksanaan pemerintahan desa dilaksanakan secara demokrasi yang mementingkan terhadap keinginan atau

kebutuhan masyarakat. Demokrasi sebagai bentuk dari pemerintahan dimana semua penduduk mempunyai hak mengambil keputusan yang bisa memperbaiki kehidupannya. Demokrasi di dalam masyarakat desa terkait dalam pembangunan merupakan kesadaran yang harus dimunculkan melalui bimbingan ataupun arahan dari penyelenggara pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa

Di dalam UU No.6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang menyebutkan bahwa, “BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya ialah perwakilan dari masyarakat desa berdasarkan daerah serta ditentukan secara demokratis”. Peran atau kedudukan BPD ini mencakup pada kepentingan masyarakat dan juga sebagai sarana masyarakat untuk mewujudkan demokrasi di tingkat desa. Keanggotaan BPD terdiri dari perwakilan masyarakat yang berasal dari tiap-tiap dusun. Anggota BPD ini dipilih oleh kepala desa sebagai perwakilan dari masyarakat dan dilakukan secara musyawarah. BPD

mempunyai hak untuk memantau jalannya pemerintahan desa sebagai bentuk dari lembaga yang mewakili masyarakat di tingkat desa dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.

BPD memiliki fungsi di dalam menjalankan pemerintahan desa yang mana sebagai mitra kepala desa dan juga sebagai bentuk keterwakilan masyarakat dalam melakukan roda pemerintahan. Di dalam UU Nomor 6 mengenai Desa Tahun 2014 dijelaskan mengenai fungsi dan hak dari BPD. Pada Pasal 55 dijelaskan bahwa fungsi dari pada BPD yaitu pertama, membahas dan menyetujui rencana peraturan desa dengan kepala desa (kades). Kedua, menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat. Ketiga, melaksanakan pemantauan kinerja kepala desa.

Dalam hal ini terkait dengan fungsi BPD yaitu menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat. Berhasil tidaknya pembangunan di desa dan terciptanya kesejahteraan masyarakat desa sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja dari BPD. Berangkat dari penjelasan diatas terkait dengan BPD yang memiliki peran dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Namun banyak sekali permasalahan yang di dapat terkait fungsi BPD yang belum dilaksanakan dengan baik.

Desa Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kondisi dan permasalahan yang riil sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah dilakukan wawancara dan observasi terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Kebutuhan yang mendesak seharusnya lebih diutamakan dan didahulukan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat dengan kinerja pemerintahan desa selalu menjadi masalah dalam pelaksanaan pemerintah desa. Dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, masyarakat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melalui pemerintahan desa. Dengan kata lain dilakukan melalui swadaya masyarakat yaitu kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

Masalah mengenai aspirasi ini berkaitan dengan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan keinginan penduduk. Bisa dikatakan bahwa BPD belum melaksanakan fungsinya dengan benarselaras dengan peraturan yang ada. BPD sebagai lembaga yang mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam bentuk pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain bahwa kewajiban dari BPD adalah menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan dapat memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Terkait dengan permasalahan diatas, bahwa kinerja BPD dalam melakukan fungsinya

masih belum berjalan dengan baik. Peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melaksanakan penelitian dengan judul **“Meninjau Ulang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Studi Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tamankuncaran.

Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui kinerja BPD dalam menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan keinginan penduduk di Desa Tamankuncaran.

Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian inidiantaranya :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Penelitian ini bisa menjadi sebuah acuan bagi BPD terutama di Desa Tamankuncaran untuk menilai kinerja dalam menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat.
 - b. Meningkatkan pemahaman warga terkait peran BPD dalam fungsi menampung dan menyalurkan keinginan penduduk.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi Peneliti :

Bisa menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan pemerintah desa terutama berkaitan dengan keinginan masyarakat yang melibatkan peran BPD dan masyarakat desa.
 - b. Bagi Instansi :

Dapat dijadikan sebuah masukan untuk dapat meningkatkan Kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan keinginan penduduk di Desa Tamankuncaran.
 - c. Bagi Universitas :

Mendapatkan hasil riset dari adanya penelitian ini terkait masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan pemerintah desa yang membutuhkan peran BPD dan peran masyarakat.
 - d. Bagi masyarakat :
 - Untuk menambah pengetahuan masyarakat Desa Tamankuncaran tentang Kinerja BPD.
 - Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Tamankuncaran

dalam menuangkan aspirasinya

Tinjauan Pustaka

Pemerintahan Desa

Pengertian desa dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1(43) mengenai Pemerintahan Daerah menyatakan Desa sebagai, “Desa merupakan desa dan desa adat atau yang dikenal dengan nama lain, berikutnya disebut desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah yang berhak untuk mengatur dan mengurus perssoalan pemerintahan, keperluan penduduk setempat berdasarkan ide masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Sabtoni, otonomi desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta keperluan penduduk setempat berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ada, serta merupakan maknabaku yang bersifat formal dan tidak jelas dalam kehidupan masyarakat desa (Sabtoni, 2005 : 16).

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang tujuan pelaksanaannya daerahdesa. Pemerintahan desa ialah tahapan memadukan upaya penduduk desa dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk. Pemerintah desa terdiri dari Pemdes dan BPD, (Surasih, 2006 : 23).

Fungsi dibentuknya Pemerintahan Desa menurut pandangan Solekhan (2012), yaitu melaksanakanpersoalan rumah tangga desa, mengimplementasikan pembangunan dan pelatihan masyarakat, mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, melakukan penguatan ketentramandan ketertiban masyarakat, perundingan penyelesaian perselisihan, melakukanpembangunan ekonomi Desa (Solekhan, 2012 : 63).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPDsebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa yang mana berarti bahwa sebagai lembaga yang mewakili masyarakat setempat. Fungsi BPD ini dapat dibilang sangat strategis karena mempunyai fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sekitar. Disamping itu BPDjuga sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan yang ada di desa. Menurut pendapat Abdullah (2007) bawa BPD dalam penyelenggara pemerintahan desa sangat penting dikarenakan hanya satu-satunya lembaga perwakilan yang memiliki fungsi saluran aspirasi utama warga desa bukan hanya berfungsi sebagai badan legislasi, tetapi sebagai arsitek perubahan dan pembangunan desa (Abdullah, 2007 : 5).

Fungsi dari pada BPD juga dijelaskan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa yang

menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi, yakni :

1. Membahas dan menyetujui rencana Peraturan Desa bersama Kades.
2. Menampung dan menyalurkan keinginan penduduk Desa ; dan
3. Melaksanakan pemantauan kinerja Kades.

Tugas BPD yang dipaparkan dalam Permendagri No. 110 Pasal 32 Tahun 2016 mengenai BPD berikut ini; (a) mencari taukeinginan masyarakat; (b) menampung keinginan masyarakat; (c) mengelola keinginan penduduk; (d) menyalurkan keinginan penduduk;(e) mengadakan diskusi BPD;(f) mengadakan diskusi desa; (g) pembentukan panitia pemilihan Kades;(h) melakukan diskusi desa khusus untuk pemilihan Kades antar waktu; (i) membahas dan menyetujuiencana Peraturan Desa dengan Kades; (j) melakukanpemantauan terhadap kinerja Kades; (k) melaksanakan evaluasi laporan keterangan pelaksanaan Pemerintahan Desa; (l) menciptakan relasi kerja yang harmonis dengan Pemdes dan lembaga Desa lainnya;(m) melakukan tugas lain yang adapadaketetapanperundang-undangan.

Kinerja

Menurut pendapat Bastian, kinerja ialah deskripsi tingkat tercapainyaimplementasi suatu kebijakan / program / kegiatanpadapelaksanaan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi yang dituangkan dalam rumusan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006 : 274). Kinerja bisa diartikan juga sebagai prestasi yang mampu diraih oleh sebuah organisasi. Untuk menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam organisasi maka kegiatan organisasi harus dapat diukur bukan semata-mata melalui masukan atau input namun lebih lagi pada keluaran ataupun manfaat dari program tersebut.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode dipenelitian iniialah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif sebagai cara dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan berdasarkan fakta yang selanjutnya diberikan sebuah kesimpulan. Sedangkan yang dimaksud dengan kualitatif yakni penelitian untuk mengetahui sebuah peristiwa yang dialami subyek peneliti, maka dari tingkah laku, sudut pandang, motivasi, tindakan dan sejenisnya.

Fokus Penelitian

fokus penelitian dalam Meninjau Ulang Kinerja BPD (Studi Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang) ialah berfokus pada kinerjaBPD saat melaksanakan fungsinya dengan menggunakan teori kinerja menurut Bastian.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebuah tempat dijalankannya penelitian oleh peneliti. Lokasi penelitian ini sudah ditetapkan diawal sesuai dengan permasalahan yang didapatkan. Selain itu penetapan lokasi juga untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Lokasi dari penelitian ini bertempat di Desa Tamankuncaran Kec.Tirtiyudo Kab.Malang. Pemilihan dan penetapan lokasi tersebut dikarenakan memang terdapat permasalahan yang perlu untuk diteliti terkait masalah aspirasi masyarakat yang kurang diperhatikan.

Sumber Data

- a. Data Primer
Data primer yaitu data yang didapat peneliti secara langsung dari sumbernya melalui wawancara.
- b. Data Sekunder
Data sekunder yakni data yang didapat tidak secara langsung yang berbentuk catatan atau dokumen, buku ilmiah, laporan, situs internet, dan lain sejenisnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara
Teknik ini menghimpun data dengan mengajukan pertanyaan pada pihak yang terkaitguna memperoleh informasi yang diperlukan. Terdapat dua model wawancara yang dipergunakan pada penelitian kualitatif yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menentukan apa saja pertanyaan yang akan disampaikan pada informan, sedangkan yang tidak terstruktur melaksanakan wawancara membuat tanpa daftar pertanyaan terlebih dahulu.
- b. Observasi
Observasi adalah sebuah kegiatan mendapatkan informasi dengan cara melihat secara langsung di lapangan untuk mengetahui dengan nyata fenomena yang ada.
- c. Dokumentasi
Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh informasi baik berupa foto, arsip, buku yang relevan, dan sejenisnya untuk melengkapi data yang belum didapat dari wawancara dan observasi

Instrumen Penelitian

Adapun instrument pada penelitian ini yaitu :

- a. Kehadiran peneliti, peneliti sebagai subjek

dalam mengumpulkan data, disamping itu peneliti juga sebagai perencana, analisis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian.

- b. Pedoman wawancara, sebagai panduan dalam proses wawancara agar berjalan dengan lancar.
- c. Alat bantu, alat bantu yang digunakan selama penelitian berlangsung seperti alat tulis, smartphone atau rekaman sebagai bukti keabsahan data penelitian.
- d. Catatan lapangan, berfungsi untuk menuliskan yang terdengar, terlihat, dirasakan, dan dipikirkan guna mendapatkan data di lapangan.

Teknik Analisis Data

Berikut Penjabaran langkah-langkah dalam analisis data menurut teori Miles, dkk.(2014:14) sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yaitu tahapan mencari, mencatat, serta menghimpun data sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan. Dokumen sebagai data pendukung dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat di Desa Tamankuncaran.
- b. Kondensasi Data
Kondensasi data adalah merangkum catatan informasi di lapangan dengan memilah hal-hal pokok serta hal-hal yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian ini. Sehingga data yang sudah dipilih akan memberi kemudahan peneliti dan bisa memberi gambaran yang rinci untuk mengumpulkan data berikutnya.
- c. Penyajian Data
Penyajian data dan informasi yang di dapat dari lapangan disajikan dalam bentuk narasi. Pada penelitian kualitatif, data yang didapatkan bisa disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Tahapan ini mengolah data didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan informasi yang menyeluruh sehingga mendapatkan data yang mudah untuk dimengerti.
- d. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan awal yang disajikan bersifat tentatif dan akan ada perubahan apabila terdapat bukti pendukung lain dalam tahap mengumpulkan data. jika pada

kesimpulan sebelumnya didukung oleh bukti valid dan konsisten maka kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya.

Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi; uji kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Sugiyono, 2007 : 270).

- a. Kredibilitas
Uji kepercayaan dalam penelitian kualitatif dilaksanakan dengan memperpanjang waktu pengamatan, meningkatkan kecermatan, triangulasi, menggunakan bahan referensi.
- b. Keteralihan
Peneliti dalam membuat laporan penelitian harus memberi penjelasan yang lengkap, jelas, sistematis dan kredibel karena pada saat pembaca memahami hasil penelitian, terdapat kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut.
- c. Ketergantungan
Dependability atau reliabilitas adalah ketika penelitian dilaksanakan oleh individu lain dengan tahapan penelitian samabisamendapatkan hasil yang sama pula. Uji dependability dilaksanakan dengan melakukan audit terhadap semua tahapan penelitian.
- d. Kepastian
Uji kepastian berarti melakukan uji pada hasil penelitian dan disangkut-pautkan dengan tahapan yang sudah dilakukan. Apabila hasil penelitian adalah fungsi dari tahapan penelitian, maka peneliti sudah mencapai standar kepastian. Pada suatu penelitian, tidak dibenarkan tidak adanya tahapan tetapi ada hasilnya.

Pembahasan

Guna mengetahui terkait kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat di Desa Tamankuncaran Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, penelitian ini menggunakan lima indikator pengukuran kinerja menurut Bastian (2006 :267) yaitu masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*).

1. Masukan (*Input*)

Masukan atau *input* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya implementasi kegiatan bisaterlaksana untuk mendapatkan keluaran. Masukan ini bisa berbentuk finansial, SDM, informasi,

kebijakan atau perundang-undangan lain-lain.

Dari hasil penelitian didapat bahwa Pemerintah Desa Tamankuncaran selalu mengikutsertakan BPD dan penduduk lain dalam setiap program. Sehingga BPD dan masyarakat mengetahui apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan dan sedang direncanakan oleh pemerintah desa. Pada saat Musyawarah Desa, masyarakat juga ikut serta dalam pelaksanaannya,

Aspirasi yang sering diusulkan oleh masyarakat mengenai pembangunan jalan, gorong-gorong dan tempat pembuangan akhir (TPA). Dalam indikator ini BPD telah melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu dengan mengadakan musyawarah tingkat dusun dan desa serta melakukan, melakukan pembahasan hasil aspirasi masyarakat, melakukan pengelolaan hasil aspirasi masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap aspirasi masyarakat.

2. Proses (*Process*)

Tahapan dalam menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat dimulai dengan menggali atau mencari tahu, kemudian menampung aspirasi, setelah itu melakukan pemilihan aspirasi, dan yang terakhir menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Desa.

Pada proses menampung dan menyalurkan keinginan dari masyarakat tentu memerlukan dana dan sarana prasarana yang memadai. BPD Desa Tamankuncaran sendiri tidak memiliki sarana prasarana yang memenuhi seperti tidak adanya kantor untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Berbeda dengan sarana prasarana, sumber pendanaan BPD Desa Tamankuncaran terpantau lancar. Sumber pendanaannya berasal dari Kabupaten, nantinya menjadi APB Desa.

Dalam implementasi proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Seperti halnya tingkat keterampilan anggota BPD yang rendah dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat ketika rapat. Selain itu, anggota BPD kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau kurang aktif dalam menjalankannya. Diketahui bahwa BPD Desa Tamankuncaran hanya menerima aspirasi dari masyarakat saja. Apabila tidak ada aspirasi, maka BPD tidak mencari tahu

apa- apa yang perlu adanya perbaikan di Desa Tamankuncaran. Padahal fungsi dari BPD itu sendiri menggali aspirasi dari masyarakat.

3. Keluaran (*Output*)

Keluaran atau *output* yaitu hasil dari sebuah proses. Hasil ini bisa berbentuk fisik dan non-fisik. *Output* merupakan hasil yang bisa dianalisis apakah program yang dilaksanakan selaras dengan rencana. *Output* dapat dijadikan acuan untuk mengukur kesuksesan suatu kegiatan.

Keluaran dari aspirasi masyarakat Desa Tamankuncaran adalah pembangunan jalan. Sebelumnya, masyarakat Desa Tamankuncaran melakukan iuran (*Swadaya*) untuk memperbaiki jalan. Kini ada kemajuan dari Pemerintahan Desa, meskipun tidak sepenuhnya diperbaiki. Terdapat sekitar 30% jalan desa dan sekitar 80% jalan umum yang telah dilakukan pembangunan.

Berdasarkan penelitian, masih terdapat aspirasi dari masyarakat yang belum terlaksanakan. Seperti halnya pembangunan gorong-gorong dan tempat pembuangan akhir (TPA).

4. Hasil (*Outcome*)

Hasil atau *outcome* merupakan segala sesuatu sebagai bentuk berfungsinya keluaran (efek langsung) atau hasil nyata dari keluaran. *Outcome* adalah tingkat pencapaian atau hasil yang lebih tinggi yang menyangkut keperluan banyak pihak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, *Outcome* dari pembangunan jalan sebagai keluaran di Desa Tamankuncaran adalah terciptanya infrastruktur jalan yang memadai, adapun pembangunan jalan yang telah terealisasi berada di RT 04 RW 01 Dusun Krajan dan RT 02 RW 02 Dusun Taman Gilang. Terdapat dua jenis pembangunan yang dilakukan yaitu pembangunan jalan aspal dan jalan rabat beton. Dengan adanya pembangunan jalan memberi kemudahan akses kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya.

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dijelaskan mengenai hak dan kewajiban desa. Salah satu poinnya ialah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan melakukan perbaikan dan pembangunan jalan, tentunya kualitas kehidupan masyarakat akan meningkat. Baik dalam segi pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya karena pergerakannya akan lebih mudah. Jadi, *outcome* nya adalah

kelangsungan hidup jangka panjang, peningkatan kualitas kehidupan, serta terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

5. Manfaat (*Benefit*)

Manfaat yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir dari implementasi kegiatan. Tahap ini mendeskripsikan manfaat yang didapat dari indikator hasil. Manfaat tersebut akan terlihat sesudah beberapa bulan atau tahun, terutama dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Manfaat dari pembangunan jalan tentunya didapat oleh masyarakat. Manfaat yang diperoleh yakni masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-harinya dengan mudah, karena telah dilakukan perbaikan jalan. Mengingat bahwa jalan tersebut merupakan akses utama menuju lahan pertanian masyarakat, sehingga adanya infrastruktur jalan yang memadai dapat mempermudah masyarakat menuju lahan. Selain bagi orang dewasa, manfaat juga diperoleh bagi anak-anak yaitu mendapatkan akses mudah menuju sekolah.

Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tamankuncaran Kec. Tirtoyudo Kab. Malang sudah berjalan dengan baik dan efektif. Dari lima indikator, hanya ada satu indikator yang belum maksimal. Berikut adalah kesimpulan secara detail dari masing-masing indikator :

1. Masukan (*input*)

Indikator input dapat disimpulkan berjalan baik, hal ini bisa dilihat dari pihak BPD yang selalu siap menampung aspirasi dari masyarakat dimana pun dan kapan pun. Selain itu, pihak BPD juga mengadakan musyawarah bersama masyarakat yaitu Musyawarah Dusun (*Musdus*) dan Musyawarah Desa (*Musdes*) melalui perwakilan masyarakat seperti RT/RW dan tokoh masyarakat. BPD juga melakukan pembahasan, pengelolaan, serta evaluasi terhadap aspirasi masyarakat.

2. Proses (*Process*)

Indikator ini belum berjalan secara maksimal, dikarenakan belum adanya sarana prasarana yang memadai. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia BPD dalam menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan keinginan dari masyarakat.

3. Keluaran (*Output*)

Indikator output berjalan baik, yaitu dapat dilihat dari terealisasinya pembangunan jalan sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah. Hanya saja pembangunan belum dilakukan sepenuhnya, seperti gorong-gorong dan tempat pembuangan akhir (TPA).

4. Hasil (Outcome)

Indikator outcome tercapai dengan maksimal hal ini bisa dilihat dari kualitas kehidupan masyarakat. Dengan adanya perbaikan dan pembangunan jalan, tentunya kualitas kehidupan masyarakat akan meningkat karena telah memiliki akses yang mudah.

5. Manfaat (Benefit)

Indikator ini tercapai, hal tersebut bisa dilihat dari kegiatan masyarakat yang berjalan dengan lancar. Dengan adanya pembangunan jalan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat menuju lahan pertanian, serta bagi anak-anak mendapatkan akses yang mudah juga menuju sekolah.

Saran

Saran yang bisa peneliti berikan untuk dapat meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo Kabupten Malang, berikut ini :

1. Mengadakan pelatihan bagi para anggota BPD untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
2. Pemerintah Desa memberikan sarana prasarana yang memadai supaya kegiatan menampung dan menyalurkan keinginan dari masyarakat lebih mudah.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Abdullah, Rozali. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Abdur Rozaki. (2004). *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi, Naskah Akademik dan Legal Drafting*. Yogyakarta: IREPress.
- Arikunto. (2000). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awang, Azam. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bastian, Indra, (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Dwiyanto, Agus, dkk. (2006). *Reformasi*

Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Miles, Huberman dan Saldana. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor : Ghalia.

Moeheriono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

Sabtoni, Anang dkk. (2005) *Prakasa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press

Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumber Jurnal:

Barniat, Z. (2019). *Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal*. 5(1), *Jurnal Analisis Sosial Polilik*

Istiqomah, S. (2015). *Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Tahun 2013)*. 3(1), *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*

Karyadijaya, G. (2013). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)*. 1(2): 197 – 205, *Jurnal Administrasi Publik*

Widiyanti, R. (2011). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Kasus di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)*. Skripsi

